



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**
**LAPORAN SINGKAT
BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN**

Tahun Sidang	: 2022 – 2023
Masa Persidangan	: III
Jenis Rapat	: <i>Courtesy Call</i>
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Jumat, 10 Februari 2023
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d. selesai
Tempat	: Gedung Nusantara III Lantai 2
Acara	: 1. Pertemuan dengan Duta Besar Republik Federal Jerman untuk RI; 2. Lain-lain
Ketua Rapat	: Sarifuddin Suding, SH., MH/ Ketua GKSB DPR RI – Parlemen Jerman DPR RI (A-515/F-PAN)
Sekretaris Rapat	: Endang Dwi Astuti, S.S., M.Si/ Kepala Bagian Sekretariat Kerjasama Bilateral
Hadir	: 1. Andi Rio Idris Padjalangi, SH, M.Kn / Anggota GKSB DPR RI – Parlemen Jerman (F-PG/A-295); 2. Dipl. Ing. Hj. Diah Nurwitasari, M.I.Pol/ Anggota GKSB DPR RI – Parlemen Jerman (F-PKS/A-429); 3. H.E. Mrs. Ina Lepel/ Duta Besar Republik Federal Jerman untuk RI; 4. Amanda Kistilensa/ Staf Politik dan Pers Kedutaan Jerman; 5. Tenaga Ahli BKSAP; 6. Sekretariat KSB BKSAP.

I. Pendahuluan

Ketua GKSB DPR RI – Parlemen Jerman Sarifuddin Suding, SH., MH. (A-515/F-PAN) menerima kehadiran Duta Besar Republik Federal Jerman untuk RI H.E. Mrs. Ina Lepel dan memulai pertemuan pada pukul 09.52 WIB dan pertemuan terbuka untuk umum.

Tenggara Barat, Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur dan Likupang di Sulawesi Utara. Selain 5 Destinasi wisata tersebut, di Indonesia juga banyak destinasi wisata lain yang bisa dikunjungi.

8. Terkait sektor pendidikan, Ketua GKSB menyampaikan bahwa Jerman menjadi salah satu tujuan pendidikan utama bagi mahasiswa-mahasiswi asal Indonesia. Untuk itu kedepannya dapat dilakukan lebih banyak pertukaran mahasiswa, serta peningkatan pendidikan vokasi antar kedua negara.
9. Duta Besar Jerman untuk Indonesia menyampaikan rasa terima kasihnya atas sambutan yang diberikan. Pihaknya menilai bahwa Indonesia terus menjadi mitra strategis bagi Jerman, baik dari sektor perdagangan, investasi, ekonomi, hingga pendidikan.
10. Terkait sektor perdagangan dan investasi, Duta Besar Jerman berharap bahwa komunitas pelaku usaha sektor industri di Indonesia dapat berpartisipasi dalam Pameran Hannover Messe yang diselenggarakan pada 17 – 21 April mendatang di kota Hannover, negara bagian Lower Saxony, Jerman. Diharapkan juga bahwa kerjasama perdagangan dan investasi antara kedua negara dapat meningkat.
11. Terkait kerjasama ekonomi, Dubes Jerman menilai bahwa kedua pihak (Indonesia-EU) perlu keluar dari zona nyamannya masing-masing dalam menghadapi sejumlah kontestasi dan kendala dalam pembahasan IEU-CEPA. Meski demikian pihaknya optimis bahwa Parlemen Eropa dapat membantu mempercepat pembahasan kesepakatan tersebut, terlebih Parlemen Indonesia memiliki hubungan baik dengan Parlemen Eropa yang ditandai dengan kehadiran Wakil Ketua Parlemen Eropa ke Indonesia saat KTT IPU dan P20.
12. Terkait kebijakan deforestasi, Dubes Jerman mengetahui adanya keresahan sejumlah pihak di Indonesia namun pihaknya menyampaikan agar pihak Indonesia tidak perlu khawatir sebab saat ini peraturan turunan kebijakan *Deforestation Free Commodities* (DFC) masih dalam pembahasan, terlebih lagi Pihak EU telah menentukan *cut-off-date* yaitu per Desember 2020. Pemerintah Indonesia juga terus menerapkan berbagai kebijakan terkait deforestasi, sehingga pelaku industri tidak perlu khawatir jika produk ekspornya tidak dapat memenuhi ketentuan DFC tersebut.
13. Terkait kebijakan karbon, Dubes menyampaikan bahwa saat ini Pemerintah Indonesia telah memiliki aturan mengenai Pajak Karbon yang telah disahkan di DPR pada tahun lalu dan akan mulai berlaku pada 2025. Pihaknya menilai baik aturan tersebut sehingga pada masa mendatang diperlukan lagi adanya diskusi lebih lanjut antar pemerintah dan pelaku sektor terkait.

14. Terkait sektor pariwisata, Dubes telah menerima informasi bahwa Kementerian Pariwisata Indonesia akan mengikuti perhelatan Internationale Tourismus-Börse (ITB) atau Pameran Pariwisata Internasional di Berlin. Pihaknya berharap melalui gelaran tersebut, Pemerintah Indonesia dapat mempertunjukkan potensi pariwisata, terutama destinasi-destinasi prioritas Indonesia.
15. Dubes Jerman juga sempat menyampaikan kekhawatiran sejumlah wisatawan Jerman mengenai pasal terkait kohabitasi di Undang-Undang KUHP yang baru disahkan pada akhir 2022. Untuk itu, kontingen Indonesia yang akan menghadiri ITB-Berlin tentu perlu mempersiapkan diri untuk menjawab pertanyaan terkait hal ini.
16. Sehubungan dengan hal itu, Ketua GKSB yang juga duduk di Komisi III, memberikan penjelasan dan *reassurance* bagi para wisatawan mancanegara termasuk wisatawan Jerman. Dimana Pasal Kohabitasi baru akan menjerat apabila pihak yang melaporkannya adalah pasangan atau keluarga (anak/orang tua) dari pihak terlapor, sehingga tidak perlu ada kekhawatiran bagi wisatawan mancanegara. Untuk itu, Ketua GKSB juga meminta Dubes Jerman untuk membantu meluruskan sejumlah anggapan yang salah terkait dengan UU KUHP yang baru tersebut.
17. Terkait sektor pendidikan, Dubes Jerman menyampaikan tingginya minat masyarakat Indonesia untuk melanjutkan studi dan bekerja di Jerman, yang mencapai 5000-6000 jumlah pelajar. Pihaknya mendorong Kerjasama yang berkelanjutan antara Goethe sebagai Lembaga utama Pendidikan dengan beberapa kementerian di Indonesia. Saat ini, Goethe telah menandatangani MoU dengan Kemenkes dalam Kurikulum untuk Poltekkes. Diharapkan akan semakin banyak Kerjasama yang akan terjalin kedepannya. Namun demikian, masih terdapat kendala bagi para pekerja di Goethe Institute terkait dengan visa, sehingga beberapa pekerja tidak bisa menetap dan bekerja di Indonesia. Untuk itu diharapkan bantuan DPR RI, terutama Komisi III untuk menjembatani permasalahan ini dengan instansi terkait.
18. Sejumlah Anggota GKSB yang hadir juga sempat berdiskusi secara langsung dengan Dubes Jerman yang baru mulai bertugas pada tahun 2021 tersebut. Anggota GKSB Dipl. Ing. Diah Nurwitasari, M.I.Pol (F-PKS) sempat membagikan pengalamannya saat bersekolah di Jerman, serta menyampaikan rasa apresiasinya jika dapat kembali mengunjungi kampusnya di Jerman. Sementara itu, Andi Rio Idris Padjalangi, SH, M.Kn (F-PG) menyampaikan pihaknya akan membantu mengkomunikasikan kendala visa bagi tenaga pengajar di Goethe Institut Indonesia, serta pihaknya akan mendorong ditingkatkannya promosi destinasi prioritas pariwisata Indonesia ke pihak Jerman. Selain itu, diusulkan pula ketika GKSB melakukan kunjungan ke Jerman, dapat dimanfaatkan untuk memberikan keterangan pers kepada media setempat terkait dengan Undang-Undang KUHP yang baru sehingga tidak terjadi misinterpretasi terhadap pasal-pasal di dalamnya.

14. Terkait sektor pariwisata, Dubes telah menerima informasi bahwa Kementerian Pariwisata Indonesia akan mengikuti perhelatan Internationale Tourismus-Börse (ITB) atau Pameran Pariwisata Internasional di Berlin. Pihaknya berharap melalui gelaran tersebut, Pemerintah Indonesia dapat mempertunjukkan potensi pariwisata, terutama destinasi-destinasi prioritas Indonesia.
15. Dubes Jerman juga sempat menyampaikan kekhawatiran sejumlah wisatawan Jerman mengenai pasal terkait kohabitasi di Undang-Undang KUHP yang baru disahkan pada akhir 2022. Untuk itu, kontingen Indonesia yang akan menghadiri ITB-Berlin tentu perlu mempersiapkan diri untuk menjawab pertanyaan terkait hal ini.
16. Sehubungan dengan hal itu, Ketua GKSB yang juga duduk di Komisi III, memberikan penjelasan dan *reassurance* bagi para wisatawan mancanegara termasuk wisatawan Jerman. Dimana Pasal Kohabitasi baru akan menjerat apabila pihak yang melaporkannya adalah pasangan atau keluarga (anak/orang tua) dari pihak terlapor, sehingga tidak perlu ada kekhawatiran bagi wisatawan mancanegara. Untuk itu, Ketua GKSB juga meminta Dubes Jerman untuk membantu meluruskan sejumlah anggapan yang salah terkait dengan UU KUHP yang baru tersebut.
17. Terkait sektor pendidikan, Dubes Jerman menyampaikan tingginya minat masyarakat Indonesia untuk melanjutkan studi dan bekerja di Jerman mendorong Kerjasama yang berkelanjutan antara Goethe sebagai Lembaga utama Pendidikan dengan beberapa kementerian di Indonesia. Saat ini, Goethe telah menandatangani MoU dengan Kemenkes dalam Kurikulum untuk Poltekkes. Diharapkan akan semakin banyak Kerjasama yang akan terjalin kedepannya. Namun demikian, masih terdapat kendala bagi para pekerja di Goethe Institute terkait dengan visa, sehingga beberapa pekerja tidak bisa menetap dan bekerja di Indonesia. Untuk itu diharapkan bantuan DPR RI, terutama komisi III untuk menjembatani permasalahan ini dengan instansi terkait.
18. Sejumlah Anggota GKSB yang hadir juga sempat berdiskusi secara langsung dengan Dubes Jerman yang baru mulai bertugas pada tahun 2021 tersebut. Anggota GKSB Dipl. Ing. Diah Nurwitasari, M.I.Pol (F-PKS) sempat membagikan pengalamannya saat bersekolah di Jerman, serta menyampaikan rasa apresiasinya jika dapat kembali mengunjungi kampusnya di Jerman. Sementara itu, Andi Rio Idris Padjalangi, SH, M.Kn (F-PG) menyampaikan pihaknya akan membantu mengkomunikasikan kendala visa bagi tenaga pengajar di Goethe Institut Indonesia, serta pihaknya akan mendorong ditingkatkannya promosi destinasi prioritas pariwisata Indonesia ke pihak Jerman. Selain itu, diusulkan pula ketika GKSB melakukan kunjungan ke Jerman, dapat dimanfaatkan untuk memberikan keterangan pers kepada media setempat terkait dengan Undang-Undang KUHP yang baru sehingga tidak terjadi misinterpretasi terhadap pasal-pasal di dalamnya.

III. Penutup

Rapat ditutup oleh ketua rapat pada pukul 10.53 WIB dengan pertukaran cinderamata dan acara dilanjutkan dengan tour building Gedung DPR RI didampingi oleh Anggota GKSB DPR RI – Parlemen Jerman, Dipl. Ing. Diah Nurwitasari, M.I.Pol (F-PKS)

Jakarta, 10 Februari 2023

a.n. Ketua Rapat

Sekretaris Rapat



Endang Dwi Astuti, S.S., M.Si.

NIP. 197206221999032001